SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 279 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ciwidey untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ciwidey untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN CIWIDEY

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Ciwidey merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Ciwidey untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Ciwidey yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Ciwidey bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Ciwidey dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Ciwidey agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Ciwidey;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ciwidey;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Ciwidey.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN CIWIDEY

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Ciwidey dalam menyusun Renja Kecamatan Ciwidey.

(2) Renstra Kecamatan Ciwidey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Ciwidey paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Ciwidey; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Ciwidey.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Ciwidey dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Ciwidey dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Ciwidey; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Ciwidey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN CIWIDEY

Pasal 5

(1) Kecamatan Ciwidey melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ciwidey dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Ciwidey sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Ciwidey terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Ciwidey.
(3) Camat Ciwidey menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Ciwidey.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN CIWIDEY

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Ciwidey dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Ciwidey mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Ciwidey dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Ciwidey, maka Renstra Kecamatan Ciwidey dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Ciwidey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Ciwidey terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Ciwidey.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 279

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 279 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIWIDEY TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tugas pokok perangkat daerah Kecamatan adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, kecamatan memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, kecamatan dituntut untuk mampu merespons kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan administrasi masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun suatu dokumen perencanaan baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada dokumen RPJMD. Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra juga menjabarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang terukur sebagai tolok ukur capaian pelaksanaan pembangunan.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan dilaksanakan melalui:

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
c. Tahapan penetapan Renstra SKPD pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Ciwidey selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapperida Kabupaten Bandung.

Dengan adanya dokumen Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, setiap program dan kegiatan kecamatan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memastikan tercapainya tujuan pembangunan wilayah secara efektif dan efisien, serta turut berkontribusi

dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 Tanggal 20 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 90);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan kinerja perangkat kecamatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung. Renstra ini menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan, pengukuran kinerja, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Kecamatan Ciwidey.

1.3.2 Tujuan

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bandung ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah kecamatan secara terukur dan operasional.
2. Menyelaraskan peran Kecamatan Ciwidey sebagai perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional, termasuk RPJMD Kabupaten Bandung
3. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan, sebagai dasar pengukuran capaian kinerja.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan melalui perencanaan berbasis hasil dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Menyediakan dasar hukum dan administratif bagi pelaksanaan tugas-tugas kecamatan, termasuk pelimpahan kewenangan dari Bupati dan koordinasi lintas sektor di tingkat wilayah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIWIDEY

Bab ini berisi mengenai gambaran pelayanan perangkat daerah, yang memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, mitra kecamatan dalam pemberian pelayanan serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN CIWIDEY

Bab ini berisi mengenai tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi mengenai rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif mulai tahun 2025 hingga tahun 2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIWIDEY

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ciwidey

Kecamatan Ciwidey merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat wilayah. Sebagai unit pelaksana teknis kewilayahan, Kecamatan Ciwidey menjalankan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif terhadap desa-desa di wilayahnya, serta menjadi simpul pelayanan langsung kepada masyarakat.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ciwidey mencakup fasilitasi administrasi kependudukan, pengurusan perizinan dan non-perizinan, koordinasi pemerintahan umum dan ketenteraman masyarakat, dukungan terhadap program sosial dan kesejahteraan warga, penyediaan informasi publik, penguatan sinergi lintas sektor di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta pengelolaan data sektoral dan teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik secara efisien dan akuntabel.

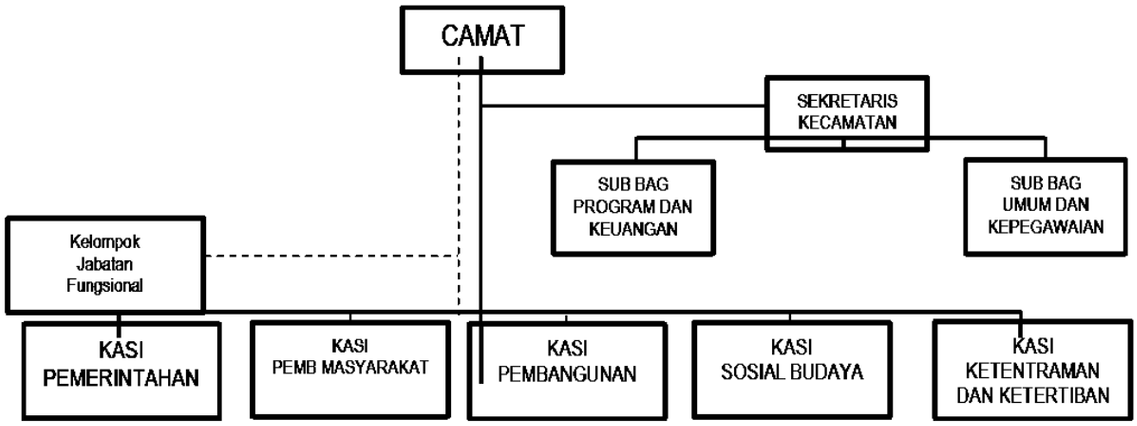
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Ciwidey

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung, Struktur Organisasi Kecamatan Ciwidey Kabupaten bandung terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Sosial Budaya
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagian Susunan Organisasi Kecamatan Ciwidey sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Kecamatan Ciwidey



Sumber: Website Kecamatan Ciwidey, 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat mempunyai Tugas melaksanakan wewenang Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Camat sebagai Perangkat Daerah merupakan bagian dari upaya membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang “Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung kepada Camat”, guna menjalankan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut mencakup bidang-bidang berikut:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4. Bidang Sosial
5. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Bidang Pertanahan
7. Bidang Lingkungan Hidup
8. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Bidang Komunikasi dan informatika

11. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12. Bidang Penanaman Modal
13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
14. Bidang Kebudayaan
15. Bidang Pariwisata
16. Bidang Pertanian

Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntanbilitas Camat.

Adapun tugas pokok dan fungsi perangkat Kecamatan Ciwidey mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data, pelaporan, bahan perumusan rencana program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Camat dan semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
b. Mempersiapkan pembinaan kepegawaian, berkas usulan PNS dalam rangka kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi lainnya;
c. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
d. Merencanakan pengadaan alat-alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya serta melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan kantor;

e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kecamatan;
f. Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah;
g. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan mengeluarkan uang Pemerintah Kecamatan;
h. Melaksanakan pengendalian tata naskah dinas yang meliputi pengurusan naskah dinas, surat masuk, naskah dinas surat keluar, penyimpanan, penerimaan dan peninjauan arsip;
i. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
k. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

2. Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemerintahan;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam

melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

5. Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan

rencana kerja Seksi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pembangunan;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

6. Seksi Sosial Budaya

Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sosial Budaya;
c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Sosial Budaya;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

7. Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perencanaandan pelayanan administrasi perencanaan dan bahan rencana anggaran Kecamatan;
b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan;

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Program dan Keuangan.

8. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, menyiapkan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Jabatan Fungsional

Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Camat.
c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
d. Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan kecamatan.
e. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
f. Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ciwidey

1. Sumber Daya Manusia

Berikut disajikan gambaran mengenai sumber daya manusia yang tersedia di Kecamatan Ciwidey Tahun 2025:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian			Jenis Kelamin		Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	Pria	Wanita	
1	Golongan IV/b	1	0	0	1	0	1
2	Golongan IV/a	1	0	0	1	0	1
3	Golongan III/d	3	0	0	3	0	3
4	Golongan III/c	3	0	0	3	0	3
5	Golongan III/b	1	0	0	1	0	1
6	Golongan III/a	4	1	0	4	1	5
7	Golongan II/d	0	0	0	0	0	0
8	Golongan II/c	1	0	0	1	0	1
9	Golongan II/b	0	0	0	0	0	0
10	Golongan II/a	0	0	0	0	0	0
11	Golongan VII	0	0	1	0	1	1
12	Golongan V	0	0	1	1	0	1
Jumlah		14	1	2	15	2	17

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ciwidey, 2025

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nama	Status Kepegawaian			Jenis Kelamin		Jumlah
	PNS	CPNS	PPPK	Pria	Wanita	
1. Pasca Sarjana/S-2	2	0	0	2	0	2
2. Sarjana/S-1	8	1	0	9	0	9

3.	Diploma III	0	0	1	0	1	1
4.	SMA/SLTA	4	0	1	4	1	5
5.	SMP/SLTP	0	0	0	0	0	0
6.	SD	0	0	0	0	0	0
Jumlah		14	1	2	15	2	17

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ciwidey, 2025

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

No.	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
1	Diklatpim III	2 Orang	2 Orang	0 Orang
2	Diklatpim IV	6 Orang	6 Orang	0 Orang
Jumlah		8 Orang	8 Orang	0 Orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ciwidey, 2025

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	15 orang
2	Perempuan	2 orang
Jumlah		17 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ciwidey, 2025

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ciwidey memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Saldo Akhir Berdasarkan Jenis Aset

No	Jenis Aset	Saldo Akhir	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	363.000.000	-	363.000.000
2	Peralatan dan Mesin	1.570.868.381	1.345.858.972	225.009.409
3	Gedung dan Bangunan	2.054.669.413	484.494.343	1.570.175.070
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.448.000	13.115.347	12.332.653
5	Aset Tetap Lainnya	30.396.000	-	30.396.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-		-
Total Aset Tetap		4.034.381.794	1.833.468.662	2.200.913.132
7	Aset Tak Berwujud			-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	219.280.975	219.280.975	-
9	Aset yang diman faatkan pihak lain			-
	Total Aset Lainnya	219.280.975	219.280.975	-
Total Aset Tetap + Aset Lainnya		4.253.662.769	2.052.749.637	2.200.913.132

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ciwidey, 2025

Sedangkan persentase sarana dan prasarana dengan pengelompokan kondisi aset, selengkapnya disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Klasifikasi Aset berdasarkan Kondisi

No.	Klasifikasi Kondisi Aset	Nilai Aset	Persentase
1	Baik	3.854.321.794	90,19%
2	Kurang Baik	200.000.000	4,68%
3	Rusak berat	219.280.975	5,13%
	Jumlah	4.273.602.769	100%

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ciwidey, 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Ciwidey

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Selain memiliki tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ciwidey melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan Masyarakat. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung nomor 76 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Rincian sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat dituangkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut bersifat delegasi yang terdiri atas kewenangan seragam untuk seluruh Camat dan kewenagan tidak seragam untuk Camat tertentu.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Ciwidey

1. Data Kondisi Geografis Kecamatan Ciwidey

Berdasarkan kondisi geografis, Kecamatan Ciwidey terletak di sebelah selatan ibu kota Kabupaten Bandung (Soreang), mempunyai luas wilayah 3.535 Ha, dengan jarak kurang lebih 17 km dan berada di sebelah selatan Kabupaten Bandung. Kecamatan Ciwidey terdiri dari 7 desa, 30 dusun, 152 RW dan 509

RT. Adapun batasan-batasan wilayah Kecamatan Ciwidey adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kecamatan Cililin
2. Sebelah selatan : Kecamatan Rancabali
3. Sebelah timur : Kecamatan Pasirjambu
4. Sebelah barat : Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan Ciwidey mempunyai ketinggian 1.200 m di atas permukaan laut (dpl) bertopografi berombak sampai berbukit dengan suhu maksimal 29°C dan suhu mininum 20°C. Wilayah Kecamatan dengan curah hujan rata-rata 2.149 mm / tahun. Adapun bentuk wilayah Kecamatan Ciwidey adalah sebagai berikut:

1. Datar sampai berombak : 10 %
2. Berombak sampai berbukit : 60 %
3. Berbukit dapat bergunung : 30 %

Untuk memperjelas kondisi demografi wilayah Ciwidey, tabel-tabel berikut menyajikan data desa di kecamatan, jumlah penduduk dan data demografi lainnya. Informasi ini menjadi acuan penting dalam memahami dinamika sosial dan potensi lokal.

Tabel 2. 7 Desa di Kecamatan Ciwidey

No.	Desa / Kelurahan	Luas Total Area (km^2/sq.km)	Persentase terhadap luas Kecamatan
1.	Ciwidey	2,18	6,17%
2.	Panyocokan	3,89	11,00%
3.	Sukawening	7,00	19,80%
4.	Nengkelan	3,46	9,79%
5.	Rawabogo	7,60	21,50%
6.	Lebakmuncang	8,00	22,63%
7.	Panundaan	3,22	9,11%
Total		35,35	100%

Sumber: BPS 2024, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Tabel di atas menunjukan bahwa Desa Lebakmuncang memiliki cakupan wilayah terluas di Kecamatan Ciwidey (8,00 km2/sq.km atau 22,63% dari total), diikuti oleh Rawabogo dan Sukawening. Sedangkan desa dengan wilayah relatif kecil adalah Panundaan dan Ciwidey.

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk di Kecamatan Ciwidey

No.	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Ciwidey	17237
2.	Panyocokan	14193
3.	Sukawening	12719
4.	Nengkelan	7400

No.	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
5.	Rawabogo	9357
6.	Lebakmuncang	17070
7.	Panundaan	15093
Total		93069

Sumber: BPS 2024, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Terlihat pada tabel di atas bahwa jumlah penduduk di Desa Ciwidey lebih tinggi, meskipun luas wilayahnya lebih kecil dibandingkan beberapa desa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Ciwidey relatif tinggi, yang dapat menjadi indikator dinamika sosial dan potensi ekonomi yang lebih padat di wilayah tersebut.

Tabel 2. 9 Data Demografi di Kecamatan Ciwidey

No.	Kategori	Data
1.	Jumlah Penduduk	± 93069
2.	Luas Wilayah	± 35,35 km²
3.	Kepadatan Penduduk	± 2.633 jiwa per km²
4.	Jumlah Desa	7 Desa
5.	Komposisi Usia	Mayoritas usia produktif
6.	Rasio Jenis Kelamin	Laki-laki 51% / Perempuan 49%
7.	Tingkat Pendidikan	Dominan SD–SMA
8.	Mata Pencaharian Utama	Pertanian dan Pariwisata
9.	Akses Pendidikan Tinggi	Terbatas, dominan ke luar kecamatan
10.	Pola Pemukiman	Menyebar mengikuti kontur alam

Sumber: BPS 2024, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Dapat disimpulkan juga dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk Kecamatan Ciwidey yang mencapai ±93.069 jiwa dengan luas wilayah sekitar 35,35 km² menghasilkan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu ±2.633 jiwa per km². Angka ini menunjukkan bahwa Ciwidey merupakan wilayah yang padat secara demografis, meskipun secara geografis berada di kawasan pegunungan dengan kontur alam yang tidak sepenuhnya datar. Komposisi usia yang didominasi oleh kelompok produktif, serta pola pemukiman yang menyebar mengikuti kontur, mencerminkan dinamika sosial yang aktif dan potensi ekonomi lokal yang signifikan. Dengan dominasi sektor pertanian dan pariwisata sebagai mata pencaharian utama, Ciwidey memiliki karakter wilayah yang tidak hanya subur secara fisik, tetapi juga hidup secara sosial. Kepadatan yang tinggi ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan pelestarian lingkungan.

2. Proyeksi Demografi Kecamatan Ciwidey

Proyeksi jumlah penduduk dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 1,15%—1,25% per tahun. Angka ini mengacu pada laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat tahun 2025 (1,06%) serta tren

Kabupaten Bandung yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata provinsi karena pengaruh urbanisasi, migrasi masuk, dan ekspansi wilayah metropolitan Bandung Raya.

Tabel 2. 10 Tabel Proyeksi Jumlah Penduduk Per Desa 2025-2030

No.	Desa / Kelurahan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Ciwidey	17237	17436	17637	17841	18047	18255
2.	Panyocokan	14193	14356	14521	14688	14857	15029
3.	Sukawening	12719	12865	13013	13163	13315	13469
4.	Nengkelan	7400	7485	7571	7658	7746	7835
5.	Rawabogo	9357	9464	9571	9680	9790	9902
6.	Lebakmuncang	17070	17266	17465	17666	17869	18074
7.	Panundaan	15093	15267	15442	15620	15799	15980
Total		93069	94139	95220	96316	97423	98544

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

Analisis tabel tersebut menunjukkan konsistensi pola distribusi penduduk antar desa. Desa Ciwidey dan Lebakmuncang diproyeksikan selalu menduduki posisi jumlah penduduk tertinggi.

Oleh karena itu, Kecamatan Ciwidey merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung yang memiliki daya tarik geografis dan potensi pengembangan yang sangat menjanjikan. Terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 1.200 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut, Ciwidey menawarkan iklim sejuk dan lanskap alam yang memukau. Keberadaan jalur utama yang menghubungkan Ciwidey dengan pusat Kota Bandung melalui Soreang menjadikan kawasan ini semakin mudah diakses, membuka peluang besar bagi investasi dan mobilitas masyarakat.

3. Potensi Kecamatan Ciwidey

Kekayaan sumber daya alam Ciwidey menjadi fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tanah yang subur mendukung pertanian hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Selain itu, aliran sungai dan danau alami seperti Situ Patenggang menyediakan sumber air yang melimpah dan berpotensi dikembangkan sebagai energi mikrohidro. Kawasan hutan dan kebun teh yang tersebar di beberapa desa juga menyimpan nilai ekologis dan potensi ekowisata yang tinggi.

Di bidang ekonomi, Ciwidey menunjukkan geliat pertumbuhan UMKM yang berbasis pada kekayaan lokal. Produk olahan seperti selai stroberi, susu segar, keripik sayur, serta kerajinan tangan mulai dikenal di pasar regional dan nasional. Generasi muda mulai memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka, sementara koperasi dan kelompok usaha desa menjadi tulang punggung ekonomi komunitas. Potensi pengembangan

agrowisata dan kuliner khas daerah menjadi peluang strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata menjadi sektor unggulan yang menjadikan Ciwidey dikenal luas. Kawasan seperti Kawah Putih, Ranca Upas, Glamping Lakeside, dan kebun stroberi menjadi destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain wisata alam, beberapa desa mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi dan budaya, seperti Lebakmuncang dan Panundaan. Festival lokal dan atraksi budaya tradisional masih menyimpan potensi besar yang belum tergarap maksimal, namun dapat menjadi daya tarik tersendiri jika dikemas secara kreatif.

Dari sisi infrastruktur, Ciwidey telah mengalami peningkatan signifikan, terutama pada akses jalan utama dan fasilitas umum. Meski demikian, beberapa wilayah perbukitan dan desa terpencil masih membutuhkan perbaikan akses dan penguatan jaringan telekomunikasi. Fasilitas pendidikan dan kesehatan tersedia di tingkat kecamatan, namun pengembangan layanan berbasis digital dan transportasi publik masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara bertahap.

Secara sosial dan budaya, masyarakat Ciwidey dikenal ramah, terbuka terhadap inovasi, namun tetap menjaga nilai-nilai adat dan gotong royong. Tradisi seni seperti angklung, tari jaipong, dan pertunjukan wayang masih hidup di tengah komunitas, menjadi bagian dari identitas lokal yang kuat. Potensi budaya ini dapat diintegrasikan dalam pengembangan wisata, edukasi, dan *branding* produk khas daerah, sehingga memperkuat karakter Ciwidey sebagai wilayah yang harmonis antara alam, ekonomi, dan budaya.

4. Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Ciwidey

Memperhatikan aturan yang ada betapa kompleksnya tugas dan fungsi Kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari PD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana dan prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja Kecamatan Ciwidey selama ini kurang optimal.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Kecamatan Ciwidey perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance*, serta didukung oleh kinerja aparatur.

a. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota Satgas Linmas yang berada di desa;
2. Pembinaan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan dinas terkait serta desa untuk melihat langsung aktifitas masyarakat dalam bersiskamling;
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan dinas atau instasi terkait;
5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan instansi terkait;
6. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
7. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
8. Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar;
9. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI, karnaval umum dan pengamanan lebaran;
10. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas desa;
11. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan;
12. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan, baik di tingkat kecamatan maupun desa se-Kecamatan Ciwidey;
13. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
14. Pelaksanaan apel pagi setiap hari;
15. Mengadakan rapat koordinasi desa se-Kecamatan Ciwidey;
16. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus, baik yang di laksanakan pemerintah kabupaten maupun pihak lainnya;
17. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas dan instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;

18. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Ciwidey;
19. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
20. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan;
21. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan peleksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasililtasi, membina dan membantu kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat;
2. Memfasilitasi, membina dan membantu kegiatan revitalitas pertanian;
3. Pemantauan kegiatan perluasan rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Memfasilitasi, pembina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pengusunan rencana strategis perubahan kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah kecamatan;
9. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
10. Memfasilitasi dan memonitoring pengelolaan tempat pengolah sampah;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

13. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendanaan Keluarga Sejahtera.

c. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran beras rumah tangga miskin;
2. Monitoring penyaluran bantuan sosial;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;
5. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peraturan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020-2024

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ciwidey dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Ciwidey tahun 2021-2026. Pada periode Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung melaksanakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator sasaran strategis. Berikut adalah tabel target, realisasi dan capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026.

Tabel 2. 11 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026									
			2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai AKIP	75,6 Poin	77,05 Poin	76 Poin	77,60 Poin	77,70 Poin	79,40 Poin	77 Poin	-	77,60 Poin	-
		Persentase BMD dalam kondisi baik	94,6 %	94,50 %	94,7 %	89,41 %	94,80 %	90,19 %	94,9 %	-	95 %	-
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (*IKU)	83 Poin	82,38 Poin	84 Poin	84 Poin	85 Poin	87,31 Poin	86 Poin	-	87 Poin	-
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang (*IKU)	-	-	-	-	3 Desa	7 Desa	-	-	100 %	-

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, kemudian adanya Perubahan Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, terdapat perubahan pada indikator

sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa dimana sebelumnya “Persentase Desa Beradministrasi” baik menjadi “Jumlah Desa Cepat Berkembang”.

Realisasi "Persentase BMD / Aset dalam kondisi baik" pada tahun 2024 adalah sebesar “90,19%. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik Kecamatan Ciwidey tidak mencapai target akhir Renstra Kecamatan Ciwidey dengan capaian sebesar 94,94% dari target akhir Renstra sebesar 95% terealisasi 90,19% pada tahun 2024. Meskipun realisasi tahun 2024 belum mencapai target akhir Renstra, namun melihat tren positif dari tahun 2023 hingga 2024 dimana persentase BMD / Aset dalam kondisi baik Kecamatan Ciwidey mengalami peningkatan, untuk tahun mendatang Kecamatan Ciwidey optimis dapat melampaui target yang ditetapkan sehingga pada akhirnya target akhir Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026 dapat tercapai.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Kecamatan Ciwidey pada Renstra Tahun 2021-2026

Menyajikan data-data dan informasi terkait hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan Renstra tahun 2021-2026 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

Tabel 2. 12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026

No.	Uraian Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025					Realisasi Capaian Tahun 2021-2025			Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2025		
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD dalam kondisi baik	-	-	-	75,6 94,6	76 94,7	76,6 94,8	77 94,9	77,6 95	77,05 94,50	77,60 89,41	79,40 90,19	101,9 99,8	102,1 94,4	103,6 95,1

No.	Uraian Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025					Realisasi Capaian Tahun 2021-2025			Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2025		
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	31	-	15	4	4	4	4	15	4	4	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	5	-	-	2	1	1	1	-	2	1	-	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	5	-	-	2	1	1	1	-	2	1	-	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	4	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	5	-	-	2	1	1	1	-	2	1	-	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	35	-	16	4	5	5	5	16	4	5	100	100	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	97	-	17	16	16	16	16	12	21	21	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	8	-	-	2	2	2	2	-	2	2	-	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	-	16	-	-	4	4	4	4	-	4	4	-	100	100

No.	Uraian Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025					Realisasi Capaian Tahun 2021-2025			Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2025		
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam database	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	16	-	-	4	4	4	4	-	4	4	-	100	100
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	-	6	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	100	-
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	30	-	10	5	5	5	5	10	5	5	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	14	-	2	3	3	3	3	2	3	3	100	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	10	-	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	600	-	120	120	120	120	120	120	120	120	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	15	-	7	2	2	2	2	7	2	2	100	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	14	-	2	3	3	3	3	2	3	3	100	100	100

No.	Uraian Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025					Realisasi Capaian Tahun 2021-2025			Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2025		
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	82	-	2	20	20	20	20	2	20	20	100	100	100
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase BMD/aset dalam keadaan baik	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100
	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	8	-	-	2	2	2	2	-	2	2	-	100	100
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan operasional kantor	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	60	-	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	60	-	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	25	-	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	15	-	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100

No.	Uraian Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025					Realisasi Capaian Tahun 2021-2025			Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2025		
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	5	-	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	83	84	85	86	87	82,38	84	87,31	99,2	100	102,7
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	5	-	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
2.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	102	-	-	30	30	30	12	-	30	30	-	100	100
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	31	-	7	6	6	6	6	7	6	6	100	100	100

No.	Uraian Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025					Realisasi Capaian Tahun 2021-2025			Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2025		
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	12	-	-		4	4	4	-		4	-	-	100
3.2	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	10	-	-	4	2	2	2	-	4	2	-	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	4	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	100	100
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	4	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	100	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan Perda dan Perkada	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100

No.	Uraian Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025					Realisasi Capaian Tahun 2021-2025			Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2025		
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Republik Indonesia															
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	8	-	-	2	2	2	2	-	2	2	-	100	100
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	10	-	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	400	-	-	100	100	100	100	-	100	100	-	100	100
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	-	604	-	4	150	150	150	150	4	150	150	100	100	100

No.	Uraian Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025					Realisasi Capaian Tahun 2021-2025			Rasio Capaian Pada Tahun 2021-2025		
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	20	-	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	4	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100
	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	5	-	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	7	-	-	1	2	2	2	-	1	2	-	100	100

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

Indikator yang tercantum dalam Tabel 2.13 merupakan indikator utama, indikator program, indikator kegiatan, serta indikator subkegiatan sebagaimana dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Ciwidey. Selama periode 2022 hingga 2024, Kecamatan Ciwidey menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan publik yang signifikan, melampaui target pada indikator utama. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terus meningkat, mencerminkan efektivitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi juga mengalami kenaikan berkelanjutan, didorong oleh penerapan tata kelola yang baik, transparansi pelaporan, partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sepanjang periode pelaksanaan Rencana Strategis, seluruh target yang telah ditetapkan berhasil dicapai secara menyeluruh dan konsisten. Capaian ini bukan hanya mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga menunjukkan komitmen kolektif dari seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga arah kebijakan tetap berada di jalur yang telah dirumuskan. Setiap indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, telah direalisasikan sesuai dengan ekspektasi, bahkan dalam beberapa aspek menunjukkan peningkatan yang melampaui proyeksi awal.

Sedangkan untuk tahun 2025–2026, evaluasi belum dapat disimpulkan karena kegiatan masih berlangsung dan terdapat penyesuaian indikator. Namun, tren capaian sebelumnya menunjukkan komitmen kuat Kecamatan Ciwidey dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD dalam kondisi baik	4.576.024.710,00	4.576.024.710,00	4.576.024.710,00	4.576.024.710,00	4.576.024.710,00	5.989.899.609,00	4.600.950.794,00	5.063.697.076,00	130,8	100,5	110,6	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah	31,199,926.00	31,199,926.00	31,199,926.00	31,199,926.00	31,199,926.00	64.999.000,00	49.270.000,00	88.572.000,00	100,00	99,19	83,95	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,353,095.00	3,353,095.00	3,353,095.00	3,353,095.00	3,353,095.00	14.999.000,00	13.750.000,00	50.645.600,00	99,99	99,28	83,79	24.836.196,00	94,35

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,496,333.00	3,496,333.00	3,496,333.00	3,496,333.00	3,496,333.00	50.000.000,00	6.480.000,00	5.982.000,00	100,00	99,23	82,62	17.029.050,00	93,95
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,854,428.00	3,854,428.00	3,854,428.00	3,854,428.00	3,854,428.00	-	6.480.000,00	6.412.000,00	-	99,23	88,56	6.110.400,00	93,90
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3,711,190.00	3,711,190.00	3,711,190.00	3,711,190.00	3,711,190.00	-	6.480.000,00	6.230.000,00	-	99,23	86,04	6.080.066,67	92,64
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3,711,190.00	3,711,190.00	3,711,190.00	3,711,190.00	3,711,190.00	-	6.480.000,00	7.240.400,00	-	99,23	100,00	6.248.466,67	99,62
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,073,690.00	5,073,690.00	5,073,690.00	5,073,690.00	5,073,690.00	-	9.600.000,00	12.062.000,00	-	-	74,95	12.075.828,00	74,95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	3,883,252,855.00	3,883,252,855.00	3,883,252,855.00	3,883,252,855.00	3,883,252,855.00	5.226.518.927,00	3.934.925.331,00	4.224.882.010,00	94,12	94,45	98,11	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,872,325,000.00	3,872,325,000.00	3,872,325,000.00	3,872,325,000.00	3,872,325,000.00	5.226.518.927,00	3.927.635.331,00	4.218.296.410,00	94,12	94,45	98,13	4.501.961.142,07	95,57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,691,070.00	4,691,070.00	4,691,070.00	4,691,070.00	4,691,070.00	-	1.920.000,00	3.015.600,00	-	96,00	86,16	3.405.933,33	91,08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	3,796,190.00	3,796,190.00	3,796,190.00	3,796,190.00	3,796,190.00	-	5.370.000,00	3.570.000,00	-	99,44	85,00	4.756.666,67	92,22

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam database	11,687,524.00	11,687,524.00	11,687,524.00	11,687,524.00	11,687,524.00	-	4.950.000,00	4.422.000,00	-	99,00	88,44	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11,687,524.00	11,687,524.00	11,687,524.00	11,687,524.00	11,687,524.00	-	4.950.000,00	4.422.000,00	-	99,00	88,44	4.895.333,33	93,72
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	13,840,000.00	13,840,000.00	13,840,000.00	13,840,000.00	13,840,000.00	-	19.816.000,00	-	-	99,08	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	19.816.000,00	-	-	99,08	-	16.204.000,00	99,08
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	193,044,405.00	193,044,405.00	193,044,405.00	193,044,405.00	193,044,405.00	70.393.000,00	54.317.300,00	95.178.566,00	99,45	77,42	91,02	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,075,000.00	4,075,000.00	4,075,000.00	4,075,000.00	4,075,000.00	5.412.600,00	6.069.600,00	6.995.600,00	99,95	99,88	99,94	6.746.199,00	99,92
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62,133,000.00	62,133,000.00	62,133,000.00	62,133,000.00	62,133,000.00	26.321.000,00	12.297.500,00	25.204.066,00	99,83	99,11	90,37	21.310.890,00	96,44
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4.996.200,00	5.317.400,00	11.995.100,00	99,92	56,69	99,96	8.211.102,13	85,52
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	10.000.000,00	13.265.000,00	14.453.200,00	100,00	100,00	86,29	13.841.650,00	95,43
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8,020,000.00	8,020,000.00	8,020,000.00	8,020,000.00	8,020,000.00	2.999.200,00	3.992.800,00	6.990.600,00	99,97	99,82	99,87	5.372.825,00	99,89
Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	5.714.000,00	6.300.000,00	6.360.000,00	95,23	90,00	63,60	6.671.750,00	82,94
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,623,000.00	20,623,000.00	20,623,000.00	20,623,000.00	20,623,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65,193,405.00	65,193,405.00	65,193,405.00	65,193,405.00	65,193,405.00	14.950.000,00	7.075.000,00	23.180.000,00	99,67	39,24	96,87	16.520.375,00	78,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan operasional kantor	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	419.815.582,00	392.900.063,00	478.461.906,00	98,10	109,10	98,33	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	6.374.000,00	-	3.500.000,00	99,98	-	85,37	4.724.833,33	92,68
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	29.722.382,00	30.367.063,00	38.994.626,00	79,05	71,81	88,63	38.621.149,88	79,83
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	378.919.200,00	362.533.000,00	435.967.280,00	99,98	114,06	99,42	373.092.724,50	104,49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase BMD/aset dalam keadaan baik	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	208.173.100,00	144.772.100,00	172.180.594,00	99,13	99,26	95,82	-	-
Pemeliharaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58,200,000.00	58,200,000.00	58,200,000.00	58,200,000.00	58,200,000.00	13.752.100,00	19.451.600,00	39.402.500,00	91,68	97,26	91,61	27.577.025,00	93,52
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14,800,000.00	14,800,000.00	14,800,000.00	14,800,000.00	14,800,000.00	9.700.000,00	10.350.000,00	21.330.000,00	97,00	100,00	85,32	15.841.250,00	94,11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	184.721.000,00	114.970.500,00	111.448.094,00	99,85	99,54	99,79	123.602.311,75	99,73
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89.347.500,00	85.347.500,00	85.347.500,00	85.347.500,00	85.347.500,00	162.977.000,00	182.091.408,00	345.985.000,00	182,4	213,3	405,3	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	18.875.000,00	11.132.208,00	17.828.000,00	94,38	98,21	99,60	-	-
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	18.875.000,00	11.132.208,00	17.828.000,00	94,38	98,21	99,60	21.258.801,00	97,39

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	14,547,500.00	14,547,500.00	14,547,500.00	14,547,500.00	14,547,500.00	-	19.950.000,00	19.984.000,00	-	99,75	99,92	-	-
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7,635,000.00	7,635,000.00	7,635,000.00	7,635,000.00	7,635,000.00	-	19.950.000,00	19.984.000,00	-	99,75	99,92	17.155.666,67	99,84
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60,800,000.00	60,800,000.00	60,800,000.00	60,800,000.00	60,800,000.00	144.102.000,00	151.009.200,00	308.173.000,00	99,90	109,52	92,04	-	-
Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60,800,000.00	60,800,000.00	60,800,000.00	60,800,000.00	60,800,000.00	144.102.000,00	151.009.200,00	308.173.000,00	99,90	109,52	92,04	205.280.887,50	100,49
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	32.300.000,00	32.300.000,00	32.300.000,00	32.300.000,00	32.300.000,00		42.264.400,00	132.290.600,00	-	130,8	409,5	-	-
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10,000,000.00 -	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	61.467.800,00	-	-	93,84	-	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	61.467.800,00	-	-	93,84	37.491.950,00	93,84
Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan	22,300,000.00	22,300,000.00	22,300,000.00	22,300,000.00	22,300,000.00	-	42.264.400,00	70.822.800,00		99,05	98,10	-	-

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	-	20.000.000,00	36.883.800,00	-	100,00	97,69	23.190.169,17	98,84
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	-	11.132.200,00	16.981.000,00	-	98,21	98,63	12.694.266,67	98,42
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	-	11.132.200,00	16.958.000,00	-	98,21	98,49	12.690.433,33	98,35
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	20,800,000.00	20,800,000.00	20,800,000.00	20,800,000.00	20,800,000.00	59.984.000,00	60.242.000,00	13.200.000,00	-	98,62	97,78	-	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	20,800,000.00	20,800,000.00	20,800,000.00	20,800,000.00	20,800,000.00	59.984.000,00	60.242.000,00	13.200.000,00	-	98,62	97,78	-	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	-	6.581.000,00	13.200.000,00	-	92,89	97,78	-	-
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	6.581.000,00	13.200.000,00	-	92,89	97,78	14.144.250,00	95,34
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	59.984.000,00	53.661.000,00	-	99,97	99,37	-	-	-
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	59.984.000,00	53.661.000,00	-	99,97	99,37	-	51.529.000,00	99,67

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	89,560,000.00	89,560,000.00	89,560,000.00	89,560,000.00	89,560,000.00	89.648.000,00	53.384.400,00	68.589.600,00	99,88	96,35	92,79	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	89,560,000.00	89,560,000.00	89,560,000.00	89,560,000.00	89,560,000.00	89.648.000,00	53.384.400,00	68.589.600,00	99,88	96,35	92,79	-	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	-	9.979.000,00	8.830.000,00	24.953.000,00	99,79	100,00	99,81	15.699.000,00	99,87
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	36,560,000.00	36,560,000.00	36,560,000.00	36,560,000.00	36,560,000.00	36.680.000,00	16.724.400,00	21.296.600,00	99,78	99,88	89,03	23.765.900,00	96,23
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	42.989.000,00	27.830.000,00	22.340.000,00	99,97	93,30	89,36	30.123.625,00	94,21

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	69,955,790.00	69,955,790.00	69,955,790.00	69,955,790.00	69,955,790.00	34.570.000,00	67.213.400,00	54.152.000,00	-	99,08	98,46	41.677.450,00	98,77
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	69,955,790.00	69,955,790.00	69,955,790.00	69,955,790.00	69,955,790.00	34.570.000,00	67.213.400,00	54.152.000,00	-	99,08	98,46	41.677.450,00	98,77
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	9.671.000,00	14.763.000,00	-	97,51	98,42	12.058.716,67	97,96
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,070,790.00	9,070,790.00	9,070,790.00	9,070,790.00	9,070,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	10.420.800,00	-	-	100,00	-	10.420.800,00	100,00
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	60,885,000.00	60,885,000.00	60,885,000.00	60,885,000.00	60,885,000.00	34.570.000,00	39.621.600,00	39.389.000,00	86,43	99,05	98,47	38.572.575,00	94,65
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	100,00	-	7.500.000,00	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-		20.000.000,00	-	30.200.000,00	100,00	-	81,29	22.475.000,00	90,65

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Ciwidey

Kelompok sasaran kecamatan adalah target utama yang akan dilayani atau dilibatkan dalam pembangunan dan kegiatan di tingkat kecamatan, agar program yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciwidey, maka yang menjadi kelompok sasaran layanan Kecamatan Ciwidey antara lain sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa

Kelompok sasaran pertama adalah pemerintah desa, yang menjadi mitra utama Kecamatan Ciwidey dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal. Pelayanan kepada pemerintah desa mencakup fasilitasi program pembangunan, pendampingan administratif, serta koordinasi lintas sektor agar kebijakan dan kegiatan desa berjalan selaras dengan arah pembangunan kecamatan. Selain itu, kecamatan juga berperan dalam memberikan dukungan teknis, seperti pelatihan pengelolaan keuangan dan penggunaan sistem informasi desa, guna meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik yang akuntabel dan responsif.

b. Masyarakat

Kelompok kedua adalah masyarakat, yang menjadi penerima langsung dari berbagai bentuk pelayanan publik. Kecamatan Ciwidey berkomitmen untuk memberikan layanan yang mudah diakses, ramah, dan sesuai kebutuhan warga, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga pengaduan masyarakat. Selain pelayanan langsung, kecamatan juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan edukatif dan pemberdayaan, seperti sosialisasi kesehatan, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi komunitas lokal. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang berdaya, sadar hak dan kewajiban, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan wilayah.

c. Organisasi Perangkat Daerah

Kelompok ketiga adalah organisasi daerah, yang mencakup lembaga formal dan non-formal seperti BUMDes, LPM, PKK, organisasi keagamaan, dan mitra pembangunan lainnya. Kecamatan Ciwidey memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada organisasi-organisasi ini guna memperkuat sinergi pembangunan di tingkat lokal. Pelayanan kepada mereka meliputi fasilitasi kegiatan kelembagaan, dukungan regulasi, serta kolaborasi dalam penyusunan data dan narasi wilayah. Dengan pendekatan partisipatif, kecamatan mendorong agar organisasi daerah tidak hanya menjadi pelaksana program,

tetapi juga aktor penting dalam merancang solusi lokal yang inovatif dan berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Kecamatan Ciwidey Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Ciwidey menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik internal pemerintahan maupun eksternal. Mitra tersebut meliputi:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
    - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: untuk pelayanan dokumen kependudukan
    - Dinas Sosial: penanganan warga rentan dan bantuan sosial
    - Dinas PMD: pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa
    - Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan: koordinasi program kesehatan dan pendidikan
    - Diskominfo: dukungan sistem informasi dan digitalisasi pelayanan
    - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUKPPA): koordinasi program pengendalian penduduk, pelayanan KB, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2. Pemerintah Desa se-Kecamatan Ciwidey
    - Sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan langsung kepada masyarakat
    - Koordinasi musrenbang, data sektoral, dan penanganan isu lokal

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah
    - UPT Puskesmas, UPT Pendidikan, dan UPT Pertanian sebagai pelaksana teknis di lapangan
    - Mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan

4. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)
    - Terdiri dari unsur Polsek, Koramil, dan Kejaksaan
    - Mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan konflik sosial, dan pengawasan wilayah

5. Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial
   - PKK, Karang Taruna, LPM, dan organisasi keagamaan
   - Sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan penyebaran informasi kebijakan

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pelaku UMKM
   - Mendukung pengembangan ekonomi lokal dan fasilitasi perizinan usaha mikro
   - Menjadi mitra dalam pelatihan dan promosi produk unggulan desa

7. Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat
   - Kementerian ATR/BPN, BPS, dan BPJS
   - Dalam hal pendataan, pelayanan jaminan sosial, dan legalitas aset masyarakat

8. Masyarakat dan Tokoh Lokal
   - Sebagai penerima sekaligus pengawas pelayanan
   - Berperan dalam menyampaikan aspirasi dan menjaga sinergi sosial

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ciwidey

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Dalam rangka mendukung misi Kabupaten Bandung, kecamatan mendukung misi 3, jika ditarik ke asta cita, misi 3 mendukung asta cita poin 7. RPJMN Tahun 2025– 2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, wilayah Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan yang

dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi nasional, Pulau Jawa memiliki beban yang kompleks, mulai dari inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi dalam industri, hingga ketimpangan infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, permasalahan sosial seperti *mismatch* keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya angka kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan TBC juga menjadi isu yang harus segera ditangani. Untuk itu, identifikasi isu prioritas dan strategis menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan yang efektif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025– 2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan:

- Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam
- Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien
- Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan
- Kualitas pelayanan publik yang belum merata
- Keterbatasan kapasitas aparatur di desa maupun di kecamatan
- Minimnya partisipasi publik dan literasi politik

Kecamatan Ciwidey sebagai bagian dari Kabupaten Bandung turut merasakan tantangan pembangunan yang memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Salah satu isu krusial yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Keterbatasan konektivitas menyebabkan mobilitas penduduk antarwilayah menjadi kurang optimal, menghambat distribusi ekonomi lokal, serta memperlebar kesenjangan antara desa-desa di Kecamatan Ciwidey dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah lainnya. Akses pendidikan juga menjadi tantangan serius, terutama pada jenjang menengah

atas, ditandai dengan tidak terdapatnya satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Kecamatan Ciwidey.

Selain itu, layanan kesehatan yang belum merata dan fasilitas yang terbatas memperparah tantangan sosial di masyarakat. Kondisi ini secara keseluruhan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya daya saing lokal, dan terhambatnya percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kecamatan Ciwidey.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati Bandung terpilih, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025- 2029. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan kecamatan adalah misi ke-3 “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”. Berdasarkan kondisi Kabupaten Bandung beberapa tahun terakhir, maka tantangan pada pembangunan tata kelola pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
1	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat
2	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi *dynamic goverment*
3	Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu tantangan utama adalah kualitas

pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian karena masih diperlukan peningkatan dalam menghadapi perubahan dinamika pemerintahan yang semakin kompleks di era digital. Salah satu langkah penting untuk mengatasi tantangan ini adalah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih menghadapi kendala dalam integrasi sistem digital. Dengan meningkatkan stabilitas dan koordinasi dalam sistem digital pemerintahan, diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan transparan.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka perangkat daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Berdasarkan indikasi program pemanfaatan ruang yang tercantum dalam RTRW, perangkat daerah dapat menyusun rancangan program dan target capaian dalam kerangka jangka menengah, sebagai bagian dari pelaksanaan rencana tata ruang jangka panjang tersebut.

Dasar hukum yang menjadi landasan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044. Peraturan Daerah ini menetapkan arah kebijakan penataan ruang selama 20 tahun ke depan yang meliputi tujuan, kebijakan, strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam dokumen tersebut, Kecamatan Ciwidey ditetapkan sebagai salah satu wilayah strategis di bagian selatan yang

memiliki potensi besar dalam pengembangan agrowisata dan konservasi lingkungan. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan alamnya seperti Kawah Putih, Situ Patenggang, dan kebun teh Rancabali, yang menjadi daya tarik utama wisata alam. RTRW mengarahkan Kecamatan Ciwidey sebagai kawasan budidaya untuk pertanian hortikultura dan pariwisata berbasis alam, dengan tetap menjaga fungsi ekologisnya sebagai daerah tangkapan air dan kawasan lindung. Selain itu, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung di Kecamatan Ciwidey, seperti jaringan jalan dan fasilitas wisata, menjadi fokus utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Tantangan Kecamatan Ciwidey dalam menyelaraskan kebijakan daerah terkait pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkesinambungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bandung terletak pada kompleksitas koordinasi lintas sektor dan keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat wilayah. Sebagai wilayah yang memiliki karakter geografis khas berupa dataran tinggi, kawasan konservasi, dan zona wisata, Kecamatan Ciwidey menghadapi tekanan pembangunan yang cukup tinggi, terutama dari sektor pariwisata dan pemukiman. Hal ini menuntut kecamatan untuk mampu mengarahkan pemanfaatan ruang secara bijak agar tetap sesuai dengan peruntukan dan daya dukung lingkungan. Sehingga kebijakan-kebijakan RTRW sangatlah penting bagi Kecamatan Ciwidey dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya.

Peluang dari kebijakan RTRW bagi Kecamatan Ciwidey sangatlah terlihat berimplikasi pada pola kehidupan masyarakatnya dimana dengan adanya kebijakan - kebijakan RTRW khususnya pada Kecamatan Ciwidey diharap dapat mengakomodir saran dan tujuan kecamatan. Dengan adanya pertumbuhan masyarakat yang kian pesat dan pertumbuhan pembangunan daerah yang signifikan di wilayah Kecamatan Ciwidey, kebijakan RTRW menjadi instrumen strategis untuk mengarahkan pembangunan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung telah melaksanakan kajian mendalam terkait isu-isu strategis yang akan menjadi fondasi bagi penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terfokus dan efisien. Adapun muatan KLHS RPJMD tahun 2025- 2029 Kabupaten Bandung menitikberatkan pada 9 isu strategis pembangunan berkelanjutan, dari 9 isu strategis tersebut yang beririsan dengan wewenang Kecamatan yaitu:

Tabel 2. 15 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 4
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16
3	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	TPB 1

Sumber: KLHS RPJMD, 2025

Sebagai wilayah administratif yang terus berkembang, Kecamatan Ciwidey memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian berbagai isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Ciwidey berkomitmen untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Upaya tersebut diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan di wilayah Kecamatan Ciwidey diharapkan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, dan ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ciwidey

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang

belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu pelayanan kepada masyarakat baik berkaitan dengan pelayanan, tugas umum pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, yaitu:

a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai

Secara kuantitatif, jumlah aparatur yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban kerja yang semakin kompleks, seiring dengan peningkatan tuntutan pelayanan masyarakat dan dinamika kebijakan pemerintah. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program kerja dan keterlambatan dalam proses pelayanan administratif. Dari sisi kualitas, sebagian aparatur belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, baik dari aspek pendidikan formal maupun keterampilan teknis.

b. Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, selain itu proses pelaporan dan evaluasi kinerja aparatur sering kali belum konsisten dan belum digunakan secara maksimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Keterbatasan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kurangnya pembinaan dan pendampingan teknis secara berkala, juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan sistem ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

c. Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus strategis dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat setiap tahun, perlu upaya peningkatan kualitas agar kepuasan dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

d. Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib

Permasalahan yang muncul diantaranya adalah masih lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, seperti penyusunan APBDes, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal ini seringkali mengakibatkan keterlambatan laporan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan, serta kurang lengkapnya bukti administrasi keuangan. Kecamatan Ciwidey sebagai pembina tingkat kecamatan perlu lebih meningkatkan pembinaan, fasilitasi, verifikasi, rekomendasi, pengendalian pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.

e. Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir dan permasalahan sampah liar

Kecamatan Ciwidey menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, serta permasalahan sampah liar yang belum tertangani secara optimal.

Tabel 2. 16 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ciwidey

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan belum optimal	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Jumlah aparatur terbatas
			Rekrutmen pegawai tidak sebanding dengan kebutuhan
			Kompetensi teknis dan manajerial belum merata
		Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan	Pemahaman aparatur kecamatan terhadap konsep akuntabilitas kinerja masih terbatas
			Belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku dalam penyusunan, pengukuran, dan pelaporan kinerja
			Minimnya pendampingan/assistensi dari instansi pembina dalam penerapan SAKIP di tingkat kecamatan
		Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas
			Inovasi pelayanan masih rendah
			Belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib	Kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi masih terbatas
		Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah
			Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Sehingga, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 terdapat Isu strategis yang meliputi tujuh kelompok besar isu yang didalamnya mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yaitu:

1. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
4. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
5. Peningkatan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
7. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat

Isu strategis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung mengacu pada isu strategis RPJMD Kabupaten Bandung yang ke 6 yaitu “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan”. Transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong efisiensi dalam pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut telah ditentukan isu strategis sesuai tugas dan fungsi

Kecamatan Ciwidey. Isu strategis Kecamatan Ciwidey dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Ciwidey

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia)	Transformasi Digital	Bonus demografi	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik
	Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan	Sinkronisasi program antar OPD belum baik	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan
	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan
	Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	Perubahan Iklim	Perubahan iklim, data dukung dan daya tampung lngkungan, serta ketahanan bencana	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

Isu Strategis 1: Optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik

Isu ini muncul dari fakta bahwa jumlah aparatur yang terbatas, ditambah dengan kompetensi yang belum merata, menyebabkan sebagian tugas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan optimal. Hal ini dapat berdampak pada potensi keterlambatan layanan, rendahnya inovasi, serta terbatasnya kapasitas kecamatan dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dengan demikian, isu strategis yang harus dihadapi Kecamatan Ciwidey adalah bagaimana meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta proporsi jumlah aparatur yang sesuai kebutuhan. Upaya strategis yang dapat ditempuh meliputi penguatan manajemen SDM berbasis kompetensi, mengikutsertakan aparatur dengan pelatihan yang relevan serta pengalokasian sumber daya manusia secara lebih proporsional sesuai beban kerja.

Isu Strategis 2: Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan

Isu strategis ini muncul dari masih ditemukannya catatan kekurangan dalam hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Ciwidey. Kurangnya keterpaduan antar dokumen perencanaan, konsistensi, ketepatan data serta pemanfaatan hasil evaluasi yang belum optimal.

Untuk itu, peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja kecamatan perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan sistem informasi kinerja serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis.

Isu Strategis 3: Peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel

Kecamatan sebagai unit terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan layanan yang responsif, transparan, dan berkualitas. Namun masih terdapat permasalahan/kekurangan dari beberapa unsur pelayanan seperti waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat, belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), keterbatasan dukungan sarana prasarana serta belum optimalnya penerapan sistem digital yang dapat menjamin kecepatan dan kemudahan layanan.

Untuk itu, peningkatan mutu dan konsistensi pelayanan publik menjadi isu strategis yang harus dihadapi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kapasitas aparatur serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan Ciwidey.

Isu Strategis 4: Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan

Pengelolaan keuangan desa yang tertib menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya pencatatan administrasi, keterlambatan laporan pertanggungjawaban, serta kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi keuangan. Hal ini mengakibatkan potensi ketidakefisienan dalam pemanfaatan anggaran dan menimbulkan kerentanan terhadap kesalahan administrasi.

Oleh karena itu, strategi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa perlu difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur desa, pendampingan teknis, penerapan sistem administrasi dan pelaporan yang lebih tertib serta penguatan mekanisme pengawasan dan pendampingan.

Isu Strategis 5: Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan Permasalahan sampah liar serta risiko bencana lingkungan seperti banjir dan longsor masih menjadi tantangan bagi Kecamatan Ciwidey. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi.

Sebagai langkah strategis, diperlukan peningkatan efektivitas pengelolaan sampah melalui kolaborasi pemerintah, desa, dan masyarakat, serta penerapan pola hidup bersih dan ramah lingkungan. Selain itu, pengendalian risiko bencana perlu diperkuat dengan upaya mitigasi, pemetaan wilayah rawan serta pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat masyarakat pada khususnya. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas“.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) misi pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berahlak serta penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatis, transparan dan akuntabel;

4. Meningkatkan kualitas infrastuktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
5. Menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum.

Agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan, maka menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dan berpedoman kepada visi dan misi Bupati. Kecamatan Ciwidey mendukung pembangunan misi ke 3 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Tranparan dan Akuntabel”. Dengan tujuan RPJMD "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Kecamatan Ciwidey untuk mencapai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan peran Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di tingkat wilayah yang menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan dasar bagi masyarakat. Pelayanan publik yang dimaksud tidak hanya menyangkut layanan administrasi kependudukan, tetapi juga mencakup fasilitasi program pembangunan, pengaduan masyarakat, koordinasi antar lembaga, serta pembinaan kepada pemerintah desa.

3.1.2 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ciwidey yaitu “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Ciwidey pada periode tahun 2025-2029, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ciwidey

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET TAHUN					
				2025	2025	2026	2027	2028	2029	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0.19	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET TAHUN					
				2025	2025	2026	2027	2028	2029	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	87.48	87.67	87.88	88.10	88.33	88.57	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Ciwidey dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh PD yang bersangkutan.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Ciwidey, strategi yang perlu ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik
2. Menigkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
3. Meningkatkan kualitas pemerintahanan desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan Ciwidey

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Ciwidey dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2025-2029

Perumusan arah kebijakan Kecamatan Ciwidey untuk periode tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam menjabarkan dan menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, serta sebagai wujud nyata dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Adapun arah kebijakan Kecamatan Ciwidey yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Ciwidey

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan penjabaran operasional yang lebih terperinci dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan. Setiap elemen ini disertai dengan indikator kinerja untuk periode lima tahun mendatang.

Seluruh program yang akan dikelola oleh Kecamatan Ciwidey merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Program-program ini dilengkapi dengan indikator keluaran yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung. Untuk memastikan implementasi yang efektif, setiap program akan dijabarkan ke dalam satu atau lebih kegiatan yang terukur dan terarah. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Kecamatan Ciwidey selama periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Ciwidey

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2.Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik sektoral daerah yang telah di kumpulkan di bidang statistik	Pelakksanaan Pengupulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester a n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester a n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan
				Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Disediakan		
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			tangan Kepala Daerah				
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah / Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					Perencanaan Pembangunan di Desa		
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					ketahanan pangan keluarga		
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesdaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesdaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesdaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesdaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesdaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KECAMATAN				5.160.019.847		5.068.459.200		5.158.384.000		5.203.890.300		5.377.130.220	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	0% 53,26 Poin	61 % 53.66 Poin	4.608.507.824	61.50 % 53.86 Poin	4.576.024.710	62 % 54.06 Poin	4.576.024.710	62.50 % 54.26 Poin	4.576.024.710	63 % 54.46 Poin	4.576.024.710	S.3.1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah	100 %	100%	31.199.926	100%	31.199.926	100%	31.199.926	100%	31.199.926	100%	31.199.926	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	3.353.095	2 Dokumen	3.353.095	2 Dokumen	3.353.095	2 Dokumen	3.353.095	2 Dokumen	3.353.095	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.496.333	1 Dokumen	3.496.333	1 Dokumen	3.496.333	1 Dokumen	3.496.333	1 Dokumen	3.496.333	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.854.428	1 Dokumen	3.854.428	1 Dokumen	3.854.428	1 Dokumen	3.854.428	1 Dokumen	3.854.428	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.711.190	1 Dokumen	3.711.190	1 Dokumen	3.711.190	1 Dokumen	3.711.190	1 Dokumen	3.711.190	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.711.190	1 Dokumen	3.711.190	1 Dokumen	3.711.190	1 Dokumen	3.711.190	1 Dokumen	3.711.190	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	5.073.690	1 Dokumen	5.073.690	1 Dokumen	5.073.690	1 Dokumen	5.073.690	1 Dokumen	5.073.690	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	
Pelakksanaan Pengupulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik sektoral daerah yang telah di kumpulkan di bidang statistik	0 Data	50 Data	4.000.000	50 Data	4.000.000	50 Data	4.000.000	50 Data	4.000.000	50 Data	4.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	3.883.252.855	100%	3.883.252.855	100%	3.883.252.855	100%	3.883.252.855	100%	3.883.252.855	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	12 Orang/Bulan	3.872.325.000	12 Orang/Bulan	3.872.325.000	12 Orang/Bulan	3.872.325.000	12 Orang/Bulan	3.872.325.000	12 Orang/Bulan	3.872.325.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.691.070	1 Laporan	4.691.070	1 Laporan	4.691.070	1 Laporan	4.691.070	1 Laporan	4.691.070	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	4 Laporan	3.796.190	4 Laporan	3.796.190	4 Laporan	3.796.190	4 Laporan	3.796.190	4 Laporan	3.796.190	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Dokumen	2.440.595	1 Dokumen	2.440.595	1 Dokumen	2.440.595	1 Dokumen	2.440.595	1 Dokumen	2.440.595	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam database	100%	100%	11.687.524	100%	11.687.524	100%	11.687.524	100%	11.687.524	100%	11.687.524	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4 Laporan	11.687.524	4 Laporan	11.687.524	4 Laporan	11.687.524	4 Laporan	11.687.524	4 Laporan	11.687.524	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%	100 %	100 %	13.840.000	100 %	13.840.000	100 %	13.840.000	100 %	13.840.000	100 %	13.840.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	150 Orang	13.840.000	150 Orang	13.840.000	150 Orang	13.840.000	150 Orang	13.840.000	150 Orang	13.840.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 %	100%	207.827.519	100%	193.044.405	100%	193.044.405	100%	193.044.405	100%	193.044.405	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	6 Paket	6 Paket	4.075.000	6 Paket	4.075.000	6 Paket	4.075.000	6 Paket	4.075.000	6 Paket	4.075.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Bangunan Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52 Paket	52 Paket	82.133.000	52 Paket	62.133.000	52 Paket	62.133.000	52 Paket	62.133.000	52 Paket	62.133.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	15.000.000	32 Paket	15.000.000	32 Paket	15.000.000	32 Paket	15.000.000	32 Paket	15.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	8.020.000	9 Paket	8.020.000	9 Paket	8.020.000	9 Paket	8.020.000	9 Paket	8.020.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	18.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	100 Laporan	20.623.000	100 Laporan	20.623.000	100 Laporan	20.623.000	100 Laporan	20.623.000	100 Laporan	20.623.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	274 Laporan	59.976.519	274 Laporan	65.193.405	274 Laporan	65.193.405	274 Laporan	65.193.405	274 Laporan	65.193.405	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan operasional kantor	100 %	100%	307.700.000	100%	290.000.000	100%	290.000.000	100%	290.000.000	100%	290.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	287.700.000	12 Laporan	270.000.000	12 Laporan	270.000.000	12 Laporan	270.000.000	12 Laporan	270.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD/aset dalam keadaan baik	100 %	100%	153.000.000	100%	153.000.000	100%	153.000.000	100%	153.000.000	100%	153.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	58.200.000	6 Unit	58.200.000	6 Unit	58.200.000	6 Unit	58.200.000	6 Unit	58.200.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	14.800.000	5 Unit	14.800.000	5 Unit	14.800.000	5 Unit	14.800.000	5 Unit	14.800.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	14.800.000	1 Unit	14.800.000	1 Unit	14.800.000	1 Unit	14.800.000	1 Unit	14.800.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000.000	6 Unit	50.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100 %	100 %	311.596.233	100 %	269.818.700	100 %	359.743.500	100 %	405.249.800	100 %	578.471.720	S 3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100 %	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50 Laporan	14.000.000	50 Laporan	14.000.000	50 Laporan	14.000.000	50 Laporan	14.000.000	50 Laporan	14.000.000	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100 %	100%	14.547.500	100%	14.547.500	100%	14.547.500	100%	14.547.500	100%	14.547.500	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	7.635.000	4 Dokumen	7.635.000	4 Dokumen	7.635.000	4 Dokumen	7.635.000	4 Dokumen	7.635.000	
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	0 Unit	200 Unit	6.912.500	200 Unit	6.912.500	200 Unit	6.912.500	200 Unit	6.912.500	200 Unit	6.912.500	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100%	283.048.733	100%	241.271.200	100%	331.196.000	100%	376.702.300	100%	549.924.220	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	283.048.733	2 Laporan	241.271.200	2 Laporan	331.196.000	2 Laporan	376.702.300	2 Laporan	549.924.220	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	100 %	100 %	50.400.000	100 %	42.300.000	100 %	42.300.000	100 %	42.300.000	100 %	42.300.000	S 3.1
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100 %	100 %	30.400.000	100 %	22.300.000	100 %	22.300.000	100 %	22.300.000	100 %	22.300.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	14.100.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	14.100.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	14.100.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	14.100.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	14.100.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	4.100.000	1 Laporan	4.100.000	1 Laporan	4.100.000	1 Laporan	4.100.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1.300.000	1 Laporan	4.100.000	1 Laporan	4.100.000	1 Laporan	4.100.000	1 Laporan	4.100.000	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	5.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	30.000.000	100%	20.800.000	100%	20.800.000	100%	20.800.000	100%	20.800.000	S.3.1
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	15.000.000	100 %	5.800.000	100 %	5.800.000	100 %	5.800.000	100 %	5.800.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	5.800.000	1 Laporan	5.800.000	1 Laporan	5.800.000	1 Laporan	5.800.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada	100 %	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peraturan Kepala Daerah													
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	89.560.000	100%	89.560.000	100%	89.560.000	100%	89.560.000	100%	89.560.000	S 3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100 %	100 %	89.560.000	100 %	89.560.000	100 %	89.560.000	100 %	89.560.000	100 %	89.560.000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	3 Orang	3 Orang	35.000.000	3 Orang	35.000.000	3 Orang	35.000.000	3 Orang	35.000.000	3 Orang	35.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	50 Orang	36.560.000	50 Orang	36.560.000	50 Orang	36.560.000	50 Orang	36.560.000	50 Orang	36.560.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	18.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	69.955.790	100%	69.955.790	100%	69.955.790	100%	69.955.790	100%	69.955.790	S.3.1
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	69.955.790	100 %	69.955.790	100 %	69.955.790	100 %	69.955.790	100 %	69.955.790	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	9.070.790	7 Dokumen	5.070.790	7 Dokumen	9.070.790	7 Dokumen	5.070.790	7 Dokumen	9.070.790	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 dokumen	0	5 dokumen	4.000.000	0 dokumen	0	2 dokumen	4.000.000	0 dokumen	0	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	60.885.000	1 Dokumen	60.885.000	1 Dokumen	60.885.000	1 Dokumen	60.885.000	1 Dokumen	60.885.000	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

Ket:

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tanpa ada dukungan dari kegiatan dan subkegiatan, program prioritas pembangunan daerah tidak dapat berjalan dengan baik. Berikut ini daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah:

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Kinerja adalah hasil kerja organisasi yang diukur dari segi kualitas dan kuantitas, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Untuk mengukur pencapaian ini, diperlukan indikator kinerja yang menjadi acuan keberhasilan suatu rencana. Indikator ini juga membantu memastikan sasaran yang

ditetapkan relevan dengan kebutuhan organisasi. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, Kecamatan Ciwidey menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk periode 2025–2029. IKU ini berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian tujuan strategis dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami keterkaitan setiap indikator dengan arah kebijakan, program pembangunan dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ciwidey

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Laju IKM	%	0.19 Persen	0.22 Persen	0.24 Persen	0.25 Persen	0.26 Persen	0.27 Persen	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Untuk mendukung tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, Kecamatan Ciwidey menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK ini menjadi alat ukur keberhasilan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, memastikan setiap program dan kegiatan di tingkat kecamatan terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan adanya indikator yang jelas, pemerintah kecamatan berkomitmen untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. IKK Kecamatan Ciwidey adalah Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Laju IKM merujuk pada tingkat perubahan atau pertumbuhan nilai IKM dari satu periode ke periode berikutnya. Berbeda dengan IKM yang menggambarkan tingkat kepuasan pada satu titik waktu, laju IKM menunjukkan seberapa cepat atau signifikan peningkatan (atau penurunan) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dari tahun ke tahun. Dengan menjadikan laju IKM sebagai IKK, Kecamatan Ciwidey tidak hanya mengejar tingkat kepuasan yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa ada perbaikan

berkelanjutan dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu. Laju IKM dievaluasi setiap tahun dari 2025–2029 untuk mengidentifikasi kendala, melakukan perbaikan, dan memperkuat pelayanan yang sudah baik.

Target laju IKM Kecamatan Ciwidey selama periode 2025–2029 disajikan dalam tabel sebagai acuan peningkatan yang konsisten. Dengan target yang terukur, Kecamatan Ciwidey diharapkan dapat menjaga kualitas layanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bandung secara menyeluruh.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Laju IKM	%	0.19 Persen	0.22 Persen	0.24 Persen	0.25 Persen	0.26 Persen	0.27 Persen	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciwidey, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang dirancang sebagai pedoman pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Ciwidey. Dokumen ini tersusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Renstra ini mencakup rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penyusunannya mengedepankan pendekatan berbasis data dan partisipasi pemangku kepentingan, dengan orientasi pada hasil yang terukur dan akuntabel.

Melalui Renstra ini, Kecamatan Ciwidey diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan publik dan pemerintahan di tingkat lokal, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi Kabupaten Bandung: “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis, mulai dari tahap persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan dokumen rancangan, penyempurnaan menjadi rancangan akhir, hingga proses penetapan resmi. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan sesuai arah perencanaan yang telah ditetapkan, diperlukan penjabaran kaidah-kaidah pelaksanaan yang menjadi acuan dalam implementasinya. Kaidah -kaidah pelaksanaanya adalah sebagai berikut:

1. Camat Ciwidey Kabupaten Bandung sebagai penanggungjawab pelaksanaan Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, dan bersama Bapperida akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
2. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan

program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.

3. Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung akan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka dalam penyusunannya Renja Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daereah (RKPD) Kabupaten Bandung.
4. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung setiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Renstra Kecamatan Ciwidey dalam mencapai sasaran Renstra.
5. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung diperlukan adanya perbaikan atau perubahan Renstra, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan Perubahan Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bandung dilakukan perubahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Ciwidey berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dari aspek waktu, alokasi anggaran, maupun capaian kinerja. Proses pengendalian dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan monitoring setiap triwulan dan semester. Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, mencakup pencapaian indikator kinerja serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil dari pengendalian dan evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta perbaikan strategi dan kebijakan pembangunan Kecamatan Ciwidey secara berkelanjutan.

Soreang, September 2025
CAMAT CIWIDEY

Ttd

NARDI SUNARDI, SE, M.Si

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan ..... - 23 -
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... - 23 -
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan ..... - 24 -
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ..... - 24 -
Tabel 2. 5 Saldo Akhir Berdasarkan Jenis Aset..... - 24 -
Tabel 2. 6 Klasifikasi Aset berdasarkan Kondisi ..... - 25 -
Tabel 2. 7 Desa di Kecamatan Ciwidey ..... - 26 -
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk di Kecamatan Ciwidey ..... - 26 -
Tabel 2. 9 Data Demografi di Kecamatan Ciwidey ..... - 27 -
Tabel 2. 10 Tabel Proyeksi Jumlah Penduduk Per Desa 2025-2030 ..... - 28 -
Tabel 2. 11 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026 ..... - 33 -
Tabel 2. 12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026- 34 -
Tabel 2. 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung ..... - 42 -
Tabel 2. 14 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah ..... - 54 -
Tabel 2. 15 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung ..... - 57 -
Tabel 2. 16 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ciwidey ..... - 59 -
Tabel 2. 17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Ciwidey ..... - 62 -

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ciwidey- 67 -
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan Ciwidey ..... - 68 -
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Ciwidey ..... - 69 -

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Ciwidey ..... - 71 -
Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan ..... - 84 -
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... - 95 -
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ciwidey ..... - 96 -
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci..... - 97 -

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Kecamatan Ciwidey ..... - 17 -